

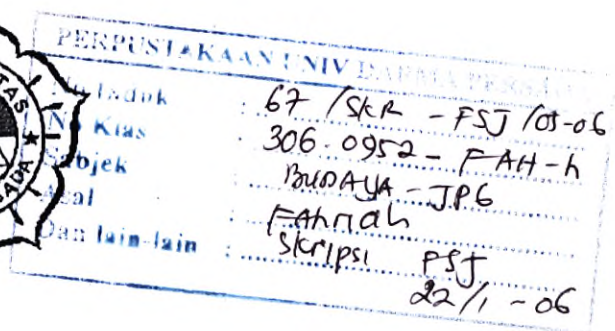
HAJI NO BUNKA DI KALANGAN EKSEKUTIF JEPANG

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai salah satu persyaratan
mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh

FAHRIAH

NIM: 01110098



JURUSAN SASTRA JEPANG
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

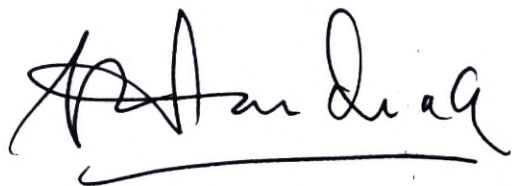
2005

Skripsi Sarjana yang berjudul:

HAJI NO BUNKA DI KALANGAN EKSEKUTIF JEPANG

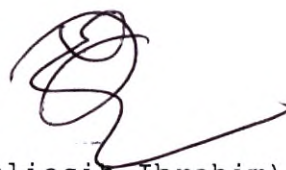
telah diuji dan diterima baik pada tanggal 8 bulan Agustus, tahun 2005 di hadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Jepang.

Pembimbing I/Penguji




(Sandra Herlina, M.A.)

Ketua Panitia/Penguji



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Pembimbing II/Penguji



(Hani Wahyuningtias, M.Si.)

sekretaris Panitia/Penguji



(Irawati Agustine, SS.)

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Sastra Jepang



(Dilla Rismayanti, M.Si.)

Dekan Fakultas Sastra



(Dr. Hj. Albertine S. Minderop, M.A.)

Skripsi Sarjana yang berjudul:

HAJI NO BUNKA DI KALANGAN EKSEKUTIF JEPANG

merupakan karya ilmiah yang saya susun di bawah bimbingan Ibu Sandra Herlina, M.A., dan Ibu Hani Wahyuningtias, M.Si., tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2005.



FAHRIAH

ABSTRAK

Haji no bunka merupakan salah satu kebudayaan yang ada dalam masyarakat Jepang. *Haji no bunka* memiliki pengaruh sebagai kontrol sosial di berbagai kalangan masyarakat Jepang termasuk di kalangan eksekutif pemerintahan. Pengaruhnya di kalangan eksekutif, salah satunya, terlihat pada saat seorang eksekutif mengundurkan diri karena terlibat dalam suatu skandal.

Pengunduran diri yang dilakukan oleh seorang eksekutif merupakan bentuk tanggung jawab dirinya dan juga merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari *haji*.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahiim

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Dalam penulisan ini saya menyadari akan kekuasaan Sang Pengasih dalam membolak-balikkan hati manusia dan betapa pertolongan hanya datang dari-Nya saja.

Selama penulisan ini, saya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Sandra Herlina, M.A., selaku pembimbing penulisan skripsi.
2. Ibu Hani Wahyuningtias, M.Si., selaku pembaca skripsi.
3. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Sidang.
4. Ibu Irawati Agustine, SS., selaku Sekretaris Sidang.

5. Ibu Dr.Hj. Albertine Minderop, M.A., selaku Dekan Fakultas Sastra.
6. Ibu Dilla Rismayanti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing selama perkuliahan serta segenap karyawan Universitas Darma Persada.
8. Orang tua serta saudara-saudaraku.
9. Teman-teman dan alumni di Studi Kerohanian Mahasiswa Islam Universitas Darma Persada.
10. Teman-teman angkatan 2001, Bunga, Mala, Linda, Sri, Mirna, Fani, Nara, Indri, Nino, Chika, Herni, Deva, Ade, dll.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Ruang Lingkup	13
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Hipotesa	14
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB 2 HAJI NO BUNKA DI KALANGAN EKSEKUTIF JEPANG	
2.1 Makna <i>Haji no Bunka</i>	17
2.2 <i>Haji no Bunka</i> dalam Masyarakat Jepang	20
2.3 <i>Haji no Bunka</i> di Kalangan Eksekutif Jepang	29

BAB 3 HUBUNGAN HAJI NO BUNKA DENGAN WHITE COLLAR CRIMINAL	
3.1 <i>White Collar Worker</i>	34
3.2 <i>White Collar Criminal</i>	35
3.3 <i>White Collar Criminal</i> di Kalangan Eksekutif Jepang...	38
3.3.1 Skandal <i>Lockheed</i>	42
3.3.2 Skandal <i>Recruit</i>	47
3.4 <i>Haji no Bunka</i> sebagai Salah Satu Kontrol Sosial.....	59
3.4.1 Kontrol Sosial	59
3.4.2 <i>Haji no Bunka</i> sebagai Kontrol Sosial	60
BAB 4 KESIMPULAN	62
GLOSARI	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan Jepang saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebudayaan bangsa tersebut. Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan cara berlaku (dalam arti kebiasaan) yang dipelajari dan pada umumnya dimiliki bersama oleh para warga dari suatu masyarakat.¹

Jepang merupakan bangsa yang dikenal dapat melestarikan kebudayaan tradisionalnya hingga saat ini. Hal ini dikemukakan Sayidiman Suryohadiprojo, seorang mantan duta besar Indonesia di Jepang, dalam bukunya. Ia mengatakan bahwa Jepang dikenal sebagai bangsa yang mampu mengambil manfaat dari hasil kebudayaan bangsa lain tanpa mengorbankan kepribadiannya. Hal ini disebabkan lamanya masa isolasi yang telah dilakukan Jepang, yaitu selama hampir tiga abad. Selama isolasi tersebut dianggap sebagai masa pemantapan kebudayaan bangsa Jepang yang

¹ T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta, 1994), hal. 21-22.

original, walaupun unsur-unsurnya telah dibentuk pada masa sebelumnya.²

Hal ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan bangsa Jepang adalah hasil *local genius* yang sangat sempurna. *Local genius* itu sendiri merupakan kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli dengan tetap mempertahankan unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional (kebudayaan asli).³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang kuat *local genius*-nya. Salah satu nilai dalam kebudayaan Jepang yang masih bertahan hingga saat ini adalah *bushidō* yang secara harfiah berarti "Jalan Prajurit" (samurai).⁴ Di dalam ajaran *bushidō* terkandung nilai-nilai yang menekankan para samurai untuk hidup hemat, menahan diri, dan menjaga harga dirinya serta tuannya.⁵

Nilai-nilai tersebut dijaga dengan sangat baik oleh para samurai. Salah satu contoh mengenai hal ini terdapat

² Sayidiman Suryohadiprojo, *Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup* (Indonesia, 1982), hal. 192-200.

³ Soerjanto Poespowardojo, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis* (Jakarta, 1989), hal. 119.

⁴ Robert N. Bellah, *Religi Tokugawa : akar-akar budaya Jepang* (Jakarta, 1992), hal. 121.

⁵ *Ibid.* hal. 127.

dalam kisah 47 *Rōnin* (samurai tanpa tuan). Kisah tersebut menceritakan tentang 47 orang *rōnin* yang selama bertahun-tahun mempersiapkan pembalasan dendam kepada orang yang telah menyebabkan kematian tuannya. Setelah berhasil membunuh orang tersebut maka para *rōnin* itu juga bunuh diri.

Kisah tersebut menggambarkan akan pentingnya harga diri bagi seorang samurai, dan harga diri tuannyapun merupakan bagian dari harga dirinya. Kematian dalam pengabdian dinilai sebagai akhir yang paling layak bagi seorang samurai.⁶

Nilai-nilai *bushidō* yang terdapat pada kalangan samurai tersebut kemudian mulai berkembang di masyarakat Jepang secara luas, terutama setelah dihapuskannya sistem pelapisan sosial yang dikenal dengan sebutan *shinōkōsō*.⁷ Nilai-nilai tersebut tidak lagi hanya sebagai nilai moral kaum samurai tetapi telah menjadi moral nasional.⁸ Moral sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa latin

⁶ Ibid. hal. 125.

⁷ *Shinōkōsō* adalah sistem pelapisan sosial yang dahulu terdapat pada masyarakat Jepang. Berdasarkan sistem tersebut, masyarakat Jepang di bagi ke dalam empat kelas yang secara berurut terdiri atas kelas samurai, petani, pengrajin, dan pedagang.

⁸ Bellah, *op. cit.*, hal. 121.

"Mos" atau "Mores" yang berarti adat istiadat atau cara hidup.⁹

Moral samurai yang kemudian diterima menjadi norma nasional tersebut tentunya mengalami perubahan dalam beberapa hal, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan kesalahan yang dapat mencoreng nama baiknya maka mungkin ia akan mengundurkan diri bukan bunuh diri, walaupun masih tetap ada orang-orang yang memilih bunuh diri.

Hal ini ditunjukkan oleh kejadian baru-baru ini pada peristiwa kecelakaan kereta api di Propinsi Hyogo, dekat Osaka. Dalam waktu dua hari setelah kecelakaan, presiden perusahaan *West Japan Railway Co* beserta para petinggi lainnya mengajukan rencana pengunduran diri. Pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan yang telah mengakibatkan lebih dari 70 orang penumpang tewas dan setidaknya 456 orang lainnya cedera.¹⁰

Berdasarkan data-data yang diperoleh, diperkirakan kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2005 tersebut disebabkan karena kereta yang melaju

⁹ Drs. Achmad Chartais Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta, 1995), hal. 13.

¹⁰ Internasional dalam *Republika*, 27 April, 2005, hal. 5.

terlalu cepat guna mengejar waktu keterlambatan, sekitar 2 menit.¹¹

Pengunduran diri tersebut bukan berarti lepas tangan dari masalah yang terjadi, tetapi sebaliknya hal ini justru merupakan bentuk tanggung jawab dan usaha untuk menjaga nama baik atau mempertahankan harga diri, karena setelah mengundurkan diri dari jabatannya ia akan tetap menyelesaikan masalah tersebut.

Mundurinya seseorang dari jabatannya ketika ia merasa gagal melakukan tugasnya merupakan salah satu bentuk norma dalam kebudayaan Jepang yang dilatarbelakangi oleh keberadaan *haji no bunka*, yang tentunya telah mendapatkan pengaruh dari nilai-nilai yang terdapat dalam *bushidō*.

Secara harfiah *haji no bunka* berasal dari kata *haji* (恥) yang berarti *shame* dan merupakan asal kata dari kata sifat *hazukashii* (恥ずかしい) yang berarti malu, sedangkan *bunka* (文化) memiliki arti *culture* atau kebudayaan. *Haji* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *Shame*, sulit diartikan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia menjadi malu, karena jika hal itu dilakukan dikhawatirkan

¹¹ Ibid.

akan terjadi kesalahpahaman atau kerancuan pengertian. Makna *haji* akan lebih baik jika dipahami melalui pengertiannya dan contoh nyatanya dalam masyarakat Jepang.

Menurut Ruth Benedict yang dimaksud dengan *haji* adalah suatu konsep moral dalam masyarakat Jepang yang berhubungan erat dengan kehormatan, dan harga diri.¹² Ia juga berpendapat bahwa *haji no bunka* merupakan dasar dari kebudayaan Jepang.¹³

Sedikit berbeda dengan Ruth Benedict, Ajip Rosidi lebih menghubungkan *haji no bunka* dengan karakter orang Jepang yang selalu berusaha menyesuaikan diri dan tidak ingin merasa berbeda dengan lingkungan atau kelompoknya. Ia memberi contoh mengenai Orang Jepang yang tinggal di Jakarta. Orang tersebut menyewa rumah di Jakarta dan menyerahkan segalanya pada pembantu, setelah satu tahun berlalu rumah yang disewa itu menjadi kotor dan rusak. Hal seperti ini ternyata tidak terjadi dengan orang Jepang yang tinggal di negaranya sendiri. Mereka selalu mengurus rumahnya dengan baik, karena mereka berada di

¹² Ruth Benedict, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni* (Jakarta, 1982), hal. 335.

¹³ Hiroshi Wagatsuma, "Haji," *Kodansha Encyclopedia of Japan* (Tokyo: Kodansha International Ltd., 1983), III, 83.

lingkungannya sendiri, dan para tetangganya melakukan hal yang sama.¹⁴

Perbedaan pengertian yang diungkapkan oleh Ruth Benedict dan Ajip Rosidi kiranya bukan hal yang bertentangan tapi justru saling melengkapi dan memiliki prinsip yang sama, yaitu sama-sama mementingkan penilaian orang lain.

Perhatian masyarakat Jepang yang besar terhadap penilaian orang lain terkait erat dengan budaya berkelompok mereka. Mereka telah terbiasa hidup berkelompok dan mengidentifikasikan diri sesuai dengan kelompok tempat mereka berada. Salah satu contoh yang lazim dalam budaya Jepang dapat dilihat pada cara seorang pekerja memperkenalkan dirinya. Biasanya seorang pekerja akan mengucapkan nama tempatnya bekerja terlebih dahulu kemudian akan diikuti oleh namanya, contoh "*Mitsubishi no Kirishima desuga,...*". Setelah itu, ia akan menyebutkan di bagian mana ia berada, bukan jabatan yang didudukinya.

Orang Jepang akan merasa lebih nyaman jika berada bersama dengan kelompoknya. Di dalam kehidupan berkelompok seperti itu, mereka berusaha agar dapat

¹⁴ Ajip Rosidi, *Orang dan Bambu Jepang*. (Jakarta, 2003), hal. 17.

diterima dengan baik oleh kelompoknya. Hal tersebut menyebabkan mereka perlu menekan ego pribadi agar tidak bertentangan dengan pendapat kelompoknya dan juga menjaga diri dari tindakan yang dapat mempermalukan atau menjatuhkan harga diri, tidak hanya bagi kelompoknya tetapi juga dirinya sendiri. Karena bagaimanapun, jika seseorang melakukan tindakan yang dapat mempermalukan ataupun menjatuhkan harga dirinya maka hal itu akan ikut menyebabkan kelompoknya merasa dipermalukan.

Keinginan untuk terus dapat diterima dalam kelompok dan kekhawatiran atas apa yang dipikirkan orang lain mengenai dirinya, telah menjadikan orang Jepang sangat berhati-hati dalam bertindak dan selalu memperhitungkan dampak yang akan diterima, tidak hanya oleh dirinya tapi juga oleh keluarga dan kelompoknya. Mereka berusaha untuk tidak menyulitkan apalagi sampai merugikan orang lain.

Karakter masyarakat Jepang yang senang berkelompok ini merupakan salah satu kontrol sosial yang sangat besar peranannya termasuk dalam menjaga kelestarian *haji no bunka*.

Pemerintahan Jepangun merupakan personifikasi dari hal tersebut. Seperti masyarakat Jepang pada umumnya,

mereka yang berada dalam pemerintahan juga sangat peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain dan selalu berusaha untuk menjaga agar dirinya tetap dihargai.

Berikut merupakan bentuk pemerintahan Jepang berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jepang.

Jepang merupakan negara Asia pertama yang menetapkan politik parlementer pada tahun 1890. Dengan bentuk pemerintahan monarki absolut, kedaulatan berada di tangan *tenno* atau kaisar. Kedaulatan baru berada di tangan rakyat sejak bulan Nopember 1946, yaitu ketika konstitusi yang sekarang diumumkan secara resmi. Sejak saat itu mulai diberlakukan sistem pemerintahan demokratis dengan parlemen sebagai lembaga tertinggi pemerintahan dan kaisar sebagai simbol negara.

Secara garis besar kekuasaan pemerintahan Jepang terbagi atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain.

Parlemen sebagai legislatif merupakan lembaga kekuasaan negara tertinggi. Di antara wewenangnya adalah memprakasai revisi konstitusi, menentukan anggaran

belanja negara, mengesahkan perjanjian-perjanjian, dan mengangkat perdana menteri. Parlemen terdiri dari *House of Representatives* (Majelis Rendah) dengan 511 kursi dan *House of Councillors* (Majelis Tinggi) dengan 252 kursi. Anggota Majelis Rendah dipilih untuk masa kerja empat tahun sedangkan Majelis Tinggi enam tahun, dengan separuh kursi terisi dalam sebuah pemilihan yang dilangsungkan setiap tiga tahun sekali.

Legislatif memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan eksekutif. Berdasarkan konstitusi, parlemen memiliki kewenangan untuk mengajukan mosi tidak percaya atau percaya kepada eksekutif.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet, terdiri dari perdana menteri dan 20 menteri negara, yang secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri merupakan seseorang yang ditunjuk oleh parlemen dan yang bersangkutan harus seorang anggota parlemen. Wewenang seorang perdana menteri meliputi pengangkatan dan pemberhentian para menteri negara. Menteri negara harus berasal dari orang sipil dan mayoritasnya adalah anggota parlemen.

Yudikatif merupakan lembaga yang menangani hukum dan peradilan. Sistem peradilan di Jepang terdiri dari beberapa kategori pengadilan yang di antaranya adalah Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan tinggi, pengadilan-pengadilan distrik, dan pengadilan-pengadilan keluarga. Selain itu, ada juga pengadilan *impreachment* yaitu pengadilan untuk pertanggungjawaban dalam parlemen, yang berfungsi untuk mengadili para hakim yang melakukan penyalahgunaan terhadap wewenangnya.¹⁵

Untuk membangun suatu negara menjadi negara maju, selain diperlukan kerjasama yang baik diantara lembaga-lembaga negara tersebut, diperlukan pula hubungan kerjasama yang baik dengan rakyat, karena tak akan ada negara tanpa adanya rakyat. Masing-masing pihak harus menjalankan kewajibannya, karena dengan menjalankan kewajiban tersebut hak pihak lain dapat terpenuhi.

Pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai dengan konstitusi sehingga rakyat dapat memperoleh hak-haknya dan rakyat menjalankan kewajibannya membayar pajak sehingga roda pemerintahan dapat terus berputar.

¹⁵ Kedutaan Besar Jepang, *Jepang Sebuah Pedoman Saku* (Jepang, 1985), hal. 12-17.

Dalam rangka menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat, biasanya dalam pemerintahan Jepang jika seseorang gagal melakukan tugasnya atau menyalahgunakan wewenangnya maka orang tersebut akan mengundurkan diri. Pengunduran diri itu sendiri merupakan konsekwensi atau bentuk pertanggungjawaban moral dari kesalahan yang dilakukannya.

Hal ini sangat penting untuk memelihara kepercayaan rakyat, karena pemerintahan baru dapat berjalan dengan baik jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tetap memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.

Mengenai pertanggungjawaban moral yang dihubungkan dengan pelanggaran hukum ini, John Braithwaite bersama temannya Brent Fisse mengungkapkan akan pentingnya penanaman rasa malu terhadap kelakuan yang tidak diharapkan. Untuk itu perlu diciptakan atau dibentuk suatu budaya dimana kejahatan dan pelanggaran hukum tidak dapat ditolerir.¹⁶

¹⁶ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Amerika Serikat, 1989), hal. 54.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian ini diketahui bahwa *haji* adalah sebagai salah satu kontrol sosial dalam masyarakat Jepang. Sesuai dengan hal tersebut maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *haji no bunka* dalam masyarakat Jepang khususnya di kalangan eksekutif.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna *haji no bunka*, bagaimana dan sejauh mana peranannya di kalangan eksekutif Jepang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini penulis batasi pada pengertian dari *haji no bunka* di dalam masyarakat Jepang dan bagaimana pengaruhnya pada kalangan eksekutif. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang, bahwa yang dimaksud dengan eksekutif dalam penelitian ini adalah mereka yang duduk di dalam kabinet

yaitu terdiri dari perdana menteri beserta para menterinya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan dan menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber baik berupa buku, jurnal, maupun artikel yang terdapat di berbagai perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Darma Persada, perpustakaan *The Japan Foundation*, dan perpustakaan Daerah Jakarta Timur. Selain itu, penulis juga menggunakan data yang diperoleh melalui *website / e library*.

1.6 Hipotesa

Haji no bunka dalam masyarakat Jepang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-harinya terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka akan merasa lebih memalukan lagi jika kesalahan tersebut merugikan orang banyak.

Di dalam pemerintahan Jepang dikenal budaya mengundurkan diri. Hal ini dilakukan jika seorang eksekutif melakukan kesalahan yang merugikan rakyat.

Bahkan tidak hanya sebatas itu, pada saat seorang eksekutif baru diduga atau diisukan melakukan korupsi maka salah satu pilihan yang mungkin akan diambil adalah mengundurkan diri. Hal ini disebabkan oleh rasa *haji* yang ditanggungnya dan merasa akan tambah memalukan dan menjatuhkan harga dirinya jika berusaha mempertahankan kedudukannya.

Budaya *haji* ini memiliki pengaruh positif dalam menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih. Dengan pemerintahan yang bersih maka hak-hak rakyat akan terpenuhi dan usaha untuk mewujudkan negara maju akan lebih mudah tercapai.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab, yaitu terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, hipotesa, dan sistematika penulisan.

BAB II *HAJI NO BUNKA* DI KALANGAN EKSEKUTIF JEPANG

Di dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pengertian dari *haji no bunka*, *haji no bunka* dalam masyarakat Jepang, dan *haji no bunka* di kalangan eksekutif Jepang.

BAB III HUBUNGAN *HAJI NO BUNKA* DENGAN *WHITE COLLAR CRIMINAL*

Di dalam bab ini penulis memaparkan mengenai hubungan *haji no bunka* dengan *white collar criminal*, contoh kasus yang berkaitan dengan *haji no bunka* di kalangan eksekutif Jepang, dan *haji no bunka* sebagai kontrol sosial.

BAB IV KESIMPULAN

Di dalam bab ini penulis memaparkan mengenai kesimpulan akhir berupa analisa dari keseluruhan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.